



## **Persamaan dan Perbedaan Agenda Setting, Framing dan Priming**

Toni Mulyadi, SE  
Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Tambang Bawah Tanah  
tonimulyadi@gmail.com

### **I. Latar Belakang**

Media merupakan salah satu pilar menjadi andalan didalam pemberantasan korupsi. Tingkat konsistensi yang diberikan oleh media massa cukup signifikan dalam pengungkapan kasus-kasus mengemplang uang rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa media mempunyai peran yang esensial mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini.

Media adalah ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Hal ini berarti bahwa di satu sisi media dapat menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Institusi media memiliki ideologi serta visi dan misi tersendiri. Ideologi tersebut mempengaruhi kebijakan redaksional tertentu, pastinya akan mencari, meliput, menulis dan melaporkan peristiwa atau realitas berdasarkan kebijakan redasional media. Kebijakan redasional terkadang membatasi kebebasan wartawan dalam memahami dan mempersepsikan sebuah realitas.

Pada makalah ini penulis mencoba melihat konsep agenda setting, framing dan priming dari pemberitaan korupsi oleh media di Indonesia, persoalan korupsi merupakan permasalahan utama di negeri ini setiap sektor di pemerintahan maupun swasta pasti terkena imbas dari perbuatan tidak terpuji ini, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan saat ini indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia. Indeks ini memetakan risiko korupsi di tiap negara. Mengutip dari hasil rilis *Harvard Business Review* per Oktober 2017 ini, Saut menuturkan indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 dari rentang 0-100. Sedangkan negara tertangga seperti Malaysia lebih tinggi atau berada di angka 50. indeks persepsi korupsi Indonesia itu memang masih jauh bila dibandingkan dengan sejumlah negara eropa dan Amerika. Seperti Denmark yang menduduki indeks persepsi korupsi tertinggi di angka



90, Amerika Serikat indeks persepsi korupsinya di angka 74, Belanda 83, Norwegia 85, dan Swedia 88 (<https://nasional.tempo.co/read/1027618/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-kalah-dari-malaysia>). Bila dilihat secara global Indonesia menempati posisi ke 90 dari 176 negara.

## II. Persamaan agenda setting, framing, dan priming

Penelitian terkait agenda setting dan framing telah mendominasi selama empat dekade penelitian empiris ilmu komunikasi tentang interface media dan politik. Agenda setting dan framing adalah bagian dari tradisi penelitian tentang bagaimana berita dapat mempengaruhi khalayak melalui pilihan cerita apa yang ditampilkan dan seberapa menonjol unsur-unsur tertentu dari cerita tersebut. Laporan berita dan fitur internal dianggap memiliki sifat respons kognitif, mekanisme melalui agenda setting dan framing efek yang terjadi. framing adalah perpanjangan dari agenda setting level kedua (Nabi & Oliver, 2009: 85).

Para ilmuwan ini berpendapat bahwa framing dan agenda setting melibatkan seperangkat mekanisme psikologis yang serupa. Framing seringkali terkait dengan agenda setting melalui priming. Framing dan priming yang berfungsi sebagai dampak kognitif media massa memiliki kesamaan. Pada level paling dasar, keduanya mendeskripsikan bagaimana struktur stimulus pesan berinteraksi dengan struktur kognisi khalayak mempengaruhi penilaian. Proses framing dan priming bisa dipertukarkan.

## III. Perbedaan Agenda setting, Framing dan Priming

### A. Agenda Setting

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang media massa dan pembentukan realitas sosial, juga penelitian tentang media massa dan pembentukan realitas sosial, juga penelitian tentang efek media yang secara esensial melihat keterkaitan media dengan sikap atau pandangan khalayak. Salah satu pendekatan itu adalah teori agenda-setting yang dikemukakan oleh Teori *agenda setting* diperkenalkan oleh Maxwell McComb dan Donald Shaw dalam "*Public Opinion quarterly*" Tahun 1972 didalam (Nabi & Oliver, 2009: 84)



Agenda setting merupakan teori yang berkaitan dengan dampak media massa terhadap pengetahuan dan pendapat khalayak terhadap suatu isi. Teori ini berintikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu. Penekanan itu mengakibatkan khalayak menganggap bahwa isu yang ditekankan oleh media massa tersebut merupakan isu yang penting, menjadi bahan pemikiran, dan pembicaraan masyarakat. Jadi ada ketertarikan antara isu yang ditekankan oleh media. Liputan media membantu untuk mendefinisikan hal-hal yang dipikirkan orang dan dicemaskan orang. Ini dinamakan penentuan agenda setting (Vivian, 2008:495).

Teori agenda setting berawal dari tulisan Lipmann 1922 yang mengatakan bahwa publik tidak merespon pada kejadian yang sebenarnya terjadi di alam ini, tetapi merespon pada "gambaran" yang ada dalam pikiran kita, yang ia sebut *pseudoenvironment*. Gambaran ini dikonstruksi oleh media massa. Kemudian pada tahun 1963 Bernard Cohen mendukung ide Lipmann dengan mengatakan bahwa media mungkin tidak berhasil membuat orang berpikir, tetapi media telah berhasil membuat orang memimikinkan apa yang perlu dipikirkan. Artinya kalau media menganggap sesuatu isu perlu dipikirkan, dibicarakan, atau dikhawatirkan publik pun akan melakukan hal yang sama. Kemudian, Lang dan Lang (1966) kembali memperkuat ide ini dimana mereka mengatakan bahwa media memfokuskan perhatian pada isu-isu tertentu. Fungsi penentuan agenda (*agenda-setting function*) media mengacu pada kemampuan media, dengan liputan berita yang diulang-ulang, untuk mengangkat pentingnya sebuah isu dalam benak publik (Severin, 2011:261).

Media secara sadar dan terus-menerus menampilkan obyek-obyek yang pada gilirannya membuat publik ikut membicarakan dan memikirkan obyek-obyek tersebut (Wimmer, 2003:408), pada bidang politik McCombs dan Shaw pernah menguji ide agenda setting pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1968. Dalam penelitian itu mereka menemukan ada hubungan yang kuat antara penekanan isu kampanye oleh media dan isu kampanye yang dianggap penting oleh pemilih.

Menurut Maxwell McCombs, melalui teori agenda setting khalayak tidak hanya mempelajari isu-isu yang muncul dipemberitaan media massa, tetapi juga mempelajari seberapa penting isu atau topik tersebut dengan melihat cara media massa memberi



penekanan terhadap isu atau topik tersebut. Hal-hal yang dipandang penting oleh media akan dianggap penting pula oleh publik sehingga menjadi agenda publik. Kalau media massa menganggap suatu isu sangat penting maka isu akan dianggap sangat penting oleh publik. Demikian juga halnya kalau media menganggap suatu isu kurang penting, maka publik pun akan menganggap isu itu kurang penting. Dalam bahasa McCombs dan Shaw *agenda setting* secara lugas dan singkat berarti “*what to think about.*” Kepentingan yang dibawa media dalam agenda setting beragam, ada kepentingan politik, ekonomi dan budaya. Hal yang ditampilkan bisa berupa isu-isu abstrak menyangkut aktifitas tertentu yang sifatnya kongkrit, defisit anggaran negara, maupun kegiatan bersifat personal.

Terdapat dua level dalam kegiatan agenda setting. McCombs & Bell tahun 1996 menyebutkan bahwa level pertama dalam agenda setting merupakan teori awal yang muncul sebelum adanya kritik dan pengembangan lebih lanjut. Pada level ini agenda setting hanya menekankan tentang rancangan topik-topik yang perlu disampaikan pada audiens. Namun teori ini tidak membahas tentang bagaimana topik-topik tersebut dapat tersampaikan secara pasti pada audiens sehingga mereka benar-benar dapat menerima secara kognisi dan mengalami proses psikologis di dalamnya dan berpikir dan merespon sesuai dengan keinginan media. Artinya media masih belum sepenuhnya dapat membentuk opini publik. Kemudian muncul teori agenda setting yang kedua yang disebut level dua. Yakni menambahkan tentang bagaimana isu yang sudah diangkat tersebut dapat tersampaikan secara pasti, bagaimana mengemas realitas tersebut menjadi nyata dan terbantu sebuah pemahaman atas definisi masalah, evaluasi moral dan rekomendasi sikap dari masalah tersebut. (Entman, 1993, p. 52 dalam Nabi & Oliver, 2009:85).

## **B. Analisa Framing**

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto 2007: 3). *Framing* sebagai sebuah proses yang menekankan atau mengonstruksi penafsiran pesan penerima adalah proses dimana terdapat tekanan atau konstruksi pengaruh pesan yang dipahami oleh penerima (Goffman 1974 dalam Nabi & Oliver, 2009: 85). Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Bateson



pada tahun 1955. Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Terkait dengan kajian wacana bahasa itu sendiri, pertama kali harus dipahami bahwa model ini merupakan salah satu bagian pemikiran yang memandang berita sebagai kontstruksi sosial yang bersifat subyektif. *Framing* sebagai sebuah proses yang menekankan atau mengonstruksi penafsiran pesan penerima adalah proses dimana terdapat tekanan atau konstruksi pengaruh pesan yang dipahami oleh penerima (Goffman 1974). Dalam Sosiologi, Bateson (1972) mengadopsi *framing* gambar untuk menjelaskan kerangka pikiran dalam menyusun informasi dan menyediakan sebuah pandangan kepada penerima pesan untuk memahami subjek masalah.

Menurut Peneliti, analisis framing adalah analisis untuk membongkar ideologi di balik penulisan informasi. Robert N. Entman, seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media, mendefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Robert Entman, melihat framing dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu (Eriyanto, 2007:186).

Ada 3 faktor yang mempengaruhi framing :

1. Karakteristik audiens ; seperti kecenderungan, tendensiusitas, kemampuan atau motivasi audiens

Ketika seseorang memiliki data sebelumnya tentang isu yang sedang diframekan maka orang akan semakin sulit menerima efek framing karena mereka akan semakin kritis, dan ini akan linier dengan motivasi dan tendensius mereka atas isu tersebut, bila bersebrangan maka mereka akan semakin resisten dengan framing yang dilakukan.

2. Bagian-bagian pesan seperti elemennya seperti resonansinya dan struktur kognisinya



Semakin pesan tersebut mengandung isu yang sesuai dengan motivasi dan kepribadia atau tendensi dari audiens maka pesan tersebut semakin mudah memnjadi frame pada audiens. Contoh : aktivis blogger pecinta lingkungan akan lebih peka terhadap isu-isu mengenai lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai emisi karbon dalam media.

3. Konteks yang mengikat individu dalam menerima pesan tersebut.

Baik personal maupun pesan akan sangat terikat dengan konteks atau situasi apa yang pesan tersebut disampaikan. Dan bagaimana ketersediaan data dan kecenderungan si audiens itu sendiri. Untuk memahami framing lebih mudah, dapat dilihat dalam model proses kognisi.

### C. Priming

Priming mengacu pada efek dari beberapa stimulus atau kejadian sebelumnya mengenai bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian atau orang berikutnya (Roskos-Ewoldsen, Roskos-Ewoldsen, & Carpentier, 2009 didalam Nabi & Oliver, 2009 : 178). Priming bukanlah teori atau penjelasan, namun merupakan prosedur yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi diwakili dan diambil dari memori. Beberapa teori memori, seperti model memori jaringan (Roskos-Ewoldsen, 1997 didalam Nabi & Oliver, 2009:178), mengasumsikan bahwa informasi disimpan dalam memori dalam bentuk titik simpul dan setiap simpul mewakili konsep unik (mis., "Manusia").

Penelitian tentang *priming* menunjukkan tiga karakteristik penting dari *priming*. Pertama, efek dari *priming* menghilang bersama waktu. Psikolog kognitif telah menunjukkan bahwa tingkat aktivasi simpul akan hilang dari waktu ke waktu jika tidak ada sumber aktivasi tambahan yang ada. Kedua, *priming* yang lebih kuat akan cenderung memiliki efek lebih kuat pada penilaian dan perilaku masyarakat. *Priming* yang lebih kuat akan menghasilkan tingkat aktivasi yang lebih tinggi pada item target, yang akan memakan waktu lebih lama untuk menghilang daripada item target yang tingkat aktivasinya lebih rendah karena *priming* yang lebih rendah (Higgins et al., 1985 didalam Nabi & Oliver, 2009: 179). Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, *priming* cenderung memiliki efek lebih kuat pada situasi yang ambigu (Otten & Stapel, 2007 didalam Nabi & Oliver, 2009 :179). Studi Graham dan Hudley (1994) di atas



memperlihatkan bahwa penilaian dan intensi dari dorongan ambigu setelah *priming* dengan kalimat terkait. Efek *priming* dapat diukur melalui tiga cara. Pertama, *priming* dapat dipelajari dengan melihat efek dari operasionalisasi yang berbeda dari *priming* pada penilaian orang terhadap kejadian ambigu. Contohnya pada penelitian Graham dan Hudley (1994) didalam Nabi & Oliver, 2009 :180), efek *priming* diukur hanya dengan membandingkan rating intensionalitas oleh kedua kelompok yang diteliti. Kedua, kita dapat mengukur efek *priming* melalui tingkah laku. Misal kita melihat peningkatan tindakan agresif pada kelompok yang menonton program yang berisi kekerasan, dan yang tidak menontonnya.

Ketiga, menggunakan teknologi yang dapat mengukur respon secara langsung dengan akurasi milidetik (Misal, waktu reaksi).Teori tentang *priming* dibangun atas dasar asumsi bahwa orang tidak mengelaborasi pengetahuan tentang persoalan politik dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang diketahuinya ketika membuat keputusan politik. Yang paling diperhatikan adalah apa yang paling cepat melintas di dalam pikirannya. Dengan memberikan perhatian pada aspek tertentu dari politik, media akan membantu untuk menentukan penilaian politik, termasuk evaluasi terhadap tokoh politik. Penelitian media yang melibatkan *priming* mengungkapkan tiga ranah utama studi: kekerasan media, keputusan politik, dan stereotip.

#### IV. Contoh dan ilustrasi Agenda setting, Framing dan Priming

Rabu, 24 Maret 2010 | 07:05

##### **Judul Berita : Inilah 'Kesaktian' Gayus Tambunan**

Inilah pegawai negeri yang fenomenal: Gayus Holomoan P. Tambunan. Usianya baru 30 tahun. Tapi, dia bisa disebut salah satu pegawai negeri terkaya di Indonesia. Tabunganya Rp 25 miliar. Padahal dia cuma pegawai negeri golongan III-A. Gayus, sehari-hari cuma menjadi penelaah keberatan pajak (banding) perorangan dan badan hukum di Kantor Pusat Direktorat Pajak Pekerjaan itulah yang membuat dia "sakti". Saat namanya disebut oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duadji orang pun geger. Sepak terjangnya diduga terkait makelar kasus. Susno menyebutkan Gayus memiliki Rp 25 miliar di rekeningnya, namun hanya Rp 395 juta yang dijadikan pidana dan disita negara. Sisanya Rp 24,6 miliar menguap entah ke mana.

Susno menuduh ada empat petinggi Polri yang terlibat pencairan itu. Mereka adalah Brigadir Jenderal EI dan RE serta sejumlah perwira di Mabes Polri terlibat manipulasi pengusutan pajak. Menurut dia, barang bukti senilai hampir Rp 24,6 miliar dicairkan tanpa prosedur yang wajar. Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Raja Erizman membantah tuduhan Susno. Menurut dia, pencairan itu sudah sah. Uang Rp 24,6 miliar itu juga disebut-sebut mengalir ke pengusaha Andi Kosasih. Dia adalah pengusaha terkenal di Batam.



Dia terkenal sebagai pengusaha garmen dan kabarnya juga punya pelabuhan. Kawan-kawannya mengenal dia dekat dengan pemerintah setempat. Gayus, menurut jaksa yang mengadilinya, Cyrus Sinaga, bertemu dengan Andi Kosasih di pesawat. "Pada 2002 pernah satu pesawat dengan Gayus, kemudian berteman dan bersangkutan mengadakan perjanjian investasi pengelolaan ruko dalam wilayah DKI Jakarta," kata Andi.

Dalam kasus pajak ini Gayus dituntut kepolisian dengan tiga pasal, yakni pasal penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Nah, di sinilah "kesaktian" Gayus yang menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum janggal. Dia persidangan dia hanya dituntut dengan pasal penggelapan. Hakim memvonisnya dengan hukuman 1 tahun percobaan. Belakangan dia dibebaskan. Satuan Tugas mencium tiga kejanggalan pengadilan Gayus. Pertama, soal ancaman hukuman, yang ternyata jauh lebih ringan dari ketentuan undang-undang. Dalam undang-undang disebutkan, pelaku tindak pidana pencucian uang mestinya dihukum paling sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta atau maksimal denda Rp 15 miliar. Majelis hakim hanya menghukum satu tahun percobaan. Artinya, Gayus bebas. Hebat bukan? Keanehan lainnya, biasanya di Pengadilan Negeri Tangerang setiap Jumat tidak digelar persidangan pidana atau perdata, yang ada hanya sidang tilang. Vonis Gayus dijatuhkan pada hari Jumat. Keanehan ketiga, jaksa hanya menuntut Gayus dengan pasal penggelapan. Menurut Satuan Tugas, terdakwa diduga melakukan pencucian uang dan korupsi. "Kesaktian" Gayus juga terlihat dalam soal tabungan Rp 25 miliar. Jamaknya, gaji Pegawai Negeri Sipil golongan IIIA di Direktorat Pajak dengan masa jabatan 0 sampai 10 tahun adalah antara Rp 1.655.800 sampai Rp 1.869.300 per bulan. Kalaupun ada tambahan maka itu berupa tunjangan lain. Sejak kasus ini merebak, Gayus langsung dicopot. Dia kini hanya menjadi pegawai pajak biasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan mengusut kasus Gayus. "Jika bersalah pasti akan ditindak," katanya. Susno Duadji sendiri hakkul yakin ada praktek makelar kasus dalam kasus pajak Gayus Tambunan.<sup>1</sup>

Sabtu, 30 September 2017 | 13:41

### **Judul Berita: 7 Kasus Tak Tersentuh Hukum yang Buktikan 'Kesaktian' Setya Novanto!**

Status tersangka, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto pada kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) hanya berlangsung seumur jagung yang disandangnya pada 17 Juli 2017 silam. Melansir dari Kompas.com, status tersangka tersebut dibatalkan oleh hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar. Namun, diketahui kasus dugaan korupsi e-KTP ini bukanlah kasus hukum pertama yang menjerat nama Setya Novanto. Bahkan, namanya tercatat dalam kasus korupsi sejak tahun 1999. Berikut tim *TribunWow.com* himpun dari berbagai sumber kasus-kasus hukum yang berhasil 'diloloskan' oleh Setya Novanto ini.

#### 1. Kasus Cessie Bank Bali (1999)

Pada era 90'an, nama Setya Novanto tercatat dalam kasus mega korupsi 'cessie' Bank Bali. Kasus ini bermula dari sang pemilik bank, Rudy Ramli mengalami kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan juga Bank Tiara pada tahun 1997. Nilainya sekitar Rp 3 triliun dan tagihan tidak bisa dibayar hingga ketiga bank tersebut masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian Rudy menyewa jasa PT Era Giat Prima. Pada perusahaan ini Joko Tjandra

<sup>1</sup> [https://nasional.tempo.co/read/234984/inilah-kesaktian-gayus-tambunan diakses hari senin 29](https://nasional.tempo.co/read/234984/inilah-kesaktian-gayus-tambunan-diakses-hari-senin-29)

Januari 2018





menjabat sebagai direktur dan Setya Novanto sebagai direktur utama. Perjanjian pengalihan hak tagih (cessie) diteken pada Januari 1999. Pihak Era mengantongi separuh dari uang yang dapat ditagih. Pemberian 'fee' yang besar itulah dianggap janggal dan kasus berlanjut ke pengadilan. Kemudian Setya Novanto menggugat Bank Bali secara perdata karena tidak mau mengucurkan komisi sebesar Rp 546 miliar. Dalam kasus "cessie" Bank Bali ini, hanya Joko Tjandra, Pande Lubis (Wakil Ketua BPPN) dan Syahril Sabirin (Gubernur BI) yang divonis bersalah oleh pengadilan. Sedangkan Setya Novanto melenggang bebas. Begitu juga dengan Rudy Ramli, bos Bank Bali yang tidak terkena jerat hukum.

#### 2. Kasus Beras Impor Vietnam Ilegal (2003)

Setya Novanto sempat diperiksa KPK selama 10 jam sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Hexama Finindo Gordianus Setyo Lelono dan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Bea Cukai Sofyan Permana. Saat itu, Setya Novanto diperiksa sebagai saksi dalam perkara impor ilegal 60 ribu ton beras dari Vietnam yang merugikan negara sebesar Rp 122,5 miliar.

#### 3. Kasus Limbah Beracun B3 di Pulau Galang, Kepulauan Riau (2006)

Tahun 2006 lebih dari 1000 ton limbah beracun yang berasal dari Singapura mendarat di Pulau Galang, Batam. Uji Laboratorium Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) mengungkapkan bahwa limbah yang disamarkan sebagai pupuk organik tersebut mengandung tiga jenis radioaktif seperti Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228 dengan kadar 100 kali lipat di atas batas normal. Pihak pengimpor, yakni PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki oleh Setya Novanto. Politisi Golkar itu mengaku sudah mengundurkan diri tahun 2003. Namun dalam dokumen milik PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, Setya Novanto disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura.

#### 4. Kasus korupsi PON Riau (2012)

Melansir dari Kompas.com, Setya Novanto pernah terseret dalam kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana PON Riau 2012 silam. Pada saat itu Setya Novanto sempat diperiksa oleh KPK sebagai saksi atas tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Ia diperiksa KPK karena pernah ditemui oleh Rusli dan melakukan pembicaraan mengenai proyek pembangunan sarana dan prasarana PON 2012. Setya Novanto diperiksa oleh KPK pada tahun 2013 sebagai saksi atas Rusli Zainal yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat itu Setya Novanto mengaku tak tahu menahu terkait adanya proyek tersebut.

#### 5. Muncul di Kampanye Donald Trump (2015)

Kembali melansir dari Kompas.com, Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD) DPR sempat memutuskan Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon melanggar kode etik ringan lantaran menghadiri kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tahun 2015 silam. "MKD memutuskan memberikan teguran," kata Ketua MKD Surahman Hidayat sesuai pengambilan putusan secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015). Pada pertimbangan yang ada, MKD menilai kehadiran Novanto-Fadli di kampanye Trump tidak tepat.

#### 6. Kasus Papa Minta Saham (2015)

Nama Setya Novanto kembali mencuat saat PT Freeport akan memperpanjang kontraknya di Indonesia. Ia disebut meminta saham PT Freeport Indonesia sebesar 20 persen dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada Freeport. Bahkan saat itu Setya Novanto dituding telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk legitimasi.



## 7. Kasus dugaan korupsi E-KTP (2017)

Hakim Cipi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto. Melansir dari [Tribunnews.com](http://tribunnews.com), dalam putusannya pun penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak sah. Novanto diketahui menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017) pada pukul 17.30 WIB. "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar hakim Cipi.<sup>2</sup>

## V. Pembahasan

Dari contoh kasus diatas penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana media bisa membentuk opini publik di Indonesia. Dengan analisis menggunakan 3 teori tersebut (agenda setting, framing dan priming), yaitu:

### 1. Agenda Setting

Dari dua berita mengenai "kesaktian" atas kasus korupsi Gayus Tambunan dan Setya Novanto diatas, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Media dapat membuat apa yang sebelumnya tidak begitu terlihat menjadi sorotan publik, baik hal itu memang benar-benar penting atau tidak.

Pengaruh terpaan media ini membuat munculnya opini yang beredar dalam masyarakat dan membentuk opini umum. Mengacu dari contoh kasus korupsi sebelumnya yaitu Gayus Tambunan yang kemudian membentuk opini masyarakat bahwa kasus mega korupsi para tersangka nya sebagai fenomena yang besar. Pemberitaan adalah hasil atau output dari agenda yang dibuat oleh para awak media. Tentu saja, terdapat interaksi antara media massa dengan publiknya terlebih dahulu. Agenda media yang diterjemahkan oleh para redaksi dan wartawan tersebut "disuntikkan" kepada khalayak yang pada akhirnya sedemikian rupa membentuk agenda publik.

---

<sup>2</sup> <http://wow.tribunnews.com/2017/09/30/7-kasus-hukum-untouchable-yang-buktikan-kesaktian-setya-novanto?page=all> diakses hari senin, 29 Januari 2018



## 2. Framing

Merupakan pendekatan analisis sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak tertuju pada pesan tersebut. Jika kita membingkai teks dari dua berita korupsi diatas menurut Robert N. Entman merumuskannya ke dalam bentuk model framing sebagai berikut didalam (Eriyanto, 2007: 188-189), kita dapat menemukan 4 hal yaitu:

A. *Define Problems / Problem identification* yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan peristiwa sebagai masalah apa?

masalah perilaku korupsi mengakar yang telah menjangkiti segala kehidupan birokrasi negara ini. Gayus dan Setya Novanto merupakan sosok yang menduduki jabatan penting di birokrasi di negeri ini, dinilai cerdas mampu lolos dari jeratan pasal berlapis dari tuduhan korupsi mengaburkan sejumlah uang yang disyalir dari hasil korupsi.

B. *Diagnose causes / Causal Interpretation*, yaitu siapa penyebab masalah dan peristiwa disebabkan oleh apa?

Terlihat dari dua berita korupsi yang disajikan penyebab “sakti” nya para koruptor di negeri ini karena lemah dan rentan nya institusi-institusi penegak hukum malah melanggengkan tindak pidana korupsi.

C. *Make Moral Judgement*, yaitu nilai moral apa yang disajikan dalam menyelesaikan masalah dan nilai apa yang digunakan untuk mendelegitimasi suatu tindakan?

Gayus dan Setya Novanto digambarkan sebagai sosok koruptor yang nyaris tak tersentuh hukum, gayus secara moral bersalah karena menyuap aparat pengadilan dan menjadi makelar kasus, begitupun Setya Novanto secara moral juga bersalah sebagai ketua DPR sekaligus sebagai petinggi partai Golkar yang terhormat terbukti menerima aliran uang suap dan bernegosiasai dengan PT Freeport demi keuntungan pribadi.



D. *Treatment Recommendation*, yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah dan jalan yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasinya?

Gayus dan Setya Novanto harus dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku, dan dicopot dari segala posisi strategis dan segala kekayaannya yang berasal dari korupsi disita untuk negara.

### 3. Priming

Proses priming adalah sebuah efek dari stimulus atau kejadian pada bagaimana kita merespon, digambarkan secara jelas pada beberapa kejadian atau orang. Dalam beberapa hari memang beberapa media massa memasang pemberitaan mega korupsi Setya Novanto DPR sebagai berita utama. sehingga memunculkan kembali memori atau ingatan yang sudah tertanam didalam ingatan masyarakat yang dilakukan oleh Gayus sebelumnya

Dalam kasus skandal korupsi Gayus Tambunan sebagai pegawai Pajak dan Setya Novanto sebagai ketua DPR terlihat adanya penonjolan atau penekanan isu tentang perilaku moral dan etika politik yang mau dikembangkan oleh media massa. Selain penekanan dan perhatian terhadap isu tertentu terdapat variabel-variabel krusial dalam konsep priming, yaitu kadar isu, isu abstrak dan isu konkret; isu skandal korupsi dapat dikategorikan sebagai isu konkret, pola exposure atau terpaan. Contoh lain priming adalah ketika seseorang dari desa yang sebelumnya sering menonton sinetron kemudian mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dikota maka yang terbayang dbenak pikirannya adalah menjadi PRT dirumah kaya, mewah seperti yang ada didalam sinetron yang pernah ditonton sebelumnya.



## **Kepustakaan**

- Eriyanto. (cetakan IV : 2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Nabi, Robin L & Oliver, Mary Beth. (Penyunt.). (2009). *Media Processes and Effects*. California: Sage.
- Severin, W. J. (2011). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa* (5 ed.). (S. Hariyanto, Penerj.) Jakarta: Kencana.
- Vivian, J. (2008). *Teori Komunikasi Massa* (Vol. 8). (T. W. BS, Penerj.) Jakarta: Kencana.
- Wimmer, R. (2003). *Mass Media Research an Introduction*. USA: Wadsworth.

## **Sumber internet**

<https://nasional.tempo.co/read/1027618/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-kalah-dari-malaysia> diakses tanggal 15 Desember 2017

<https://nasional.tempo.co/read/234984/inilah-kesaktian-gayus-tambunan> diakses hari jum'at, 15 Desember 2017

<http://wow.tribunnews.com/2017/09/30/7-kasus-hukum-untouchable-yang-buktikan-kesaktian-setya-novanto?page=all> diakses hari sabtu, 16 Desember 2017